

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chaidir, 1986, *Azas dan Dasar Perpajakan*, PT Eresco, Bandung.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2013 *Metpde Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandarmaju, Bandung.
- Hadi, Moeljo, 2001, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S., H. Salim, 2006, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagravindo Persada, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2008, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Judisseno, Rimsky K., 1997, *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas, 2006, *Penagihan Pajak di Indnesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mamudji, Sri, *et al*, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Pernerbit Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Manulung, Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Komoas, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, edisi ke-2, cetakan ke-5, Liberty, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ngadijarno, F X dkk, 2006, *Lelang Teori Dan Praktek*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, cetakan ke2, Kompas, Jakarta.
- Rusjdi, Muhammad, 2007, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, edisi ke-2, indeks 2007, Jakarta.
- Siahaan, Mariot P, 2004, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemantri, Rochmat, 1991, *Azas-Azas Hukum Perpajakan*, Bina Cipta, Bandung.
- Suandy Early, 2011, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sumardjono, Maria, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Tunggal, Amin, Widjaja, 1991, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2016, *Hukum Lelang*, Jakarta, Sinar Grafindo, hlm134-135.

Perundang undangan

Vendu Reglement (Peraturan Lelang) *Staatsblaad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblaad* 1941:3. *Vendu Reglement* ini merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.

Vendu Instructie (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblaad* 1930:85. *Vendu Instructie* ini merupakan ketentuan pelaksana dari *Vendue Reglement*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1337.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 976.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis

Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 818.

Jurnal/ Artikel/ Tesis – Disertasi

Sujana Ni Putu Okta Srri Lestari, “*Pelaksanaan lelang eksekusi atas tunggakan utang pajak penghasilan di KP2LN Daerah Istimewa Yogyakarta*”, tesis kenotariatan s2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

Susilawati Desi, “*Tinjauan sosio yuridis terhadap pelaksanaan lelang eksekusi pajak di KP2LN Yogyakarta*”, tesis kenotariatan s2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005.

Internet

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-penyitaan-pelaksanaan-dasar.html>, diakses tanggal 15 april 2017.

<https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/prosedur>, diakses pada tanggal 20 september 2017.